BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

Perencanaan pembangunan wilayah adalah usaha yang terstruktur untuk mengarahkan pengembangan yang efisien, efektif, dan berkelanjutan. Dalam rangka mendukung tujuan ini, pemerintah Indonesia telah memulai berbagai reformasi, salah satunya adalah dengan mengadopsi teknologi informasi dalam sistem perencanaan pembangunan yang disebut e-Planning. E-Planning adalah sebuah inovasi yang berbasis teknologi dengan tujuan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah.

Dalam zaman globalisasi sekarang, perekembangan dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi membutuhkan penyesuaian yang berkelanjutan untuk melakukan perubahan dan perbaikan di berbagai sektor.situasi ini menciptakan peluang besar bagi indonesia secara keseluruham,serta bagi instansi pe,erintah atau OPD secara spesifik,untuk mengadopsi dan memanfaatkan teknologi informasi serta internet dalam struktur pemerintahan.dengan demikian, untuk mencapai penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang efisien dan efektif,sangat penting untuk mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi melalui pengaturan sistem manajemen dan proses kerja dalam lingkungan pemerintahan yang berbasis elektronik.

Teknologi memiliki peran signifikan sebagai instrumen paling penting dalam memperbaiki mutu pelayanan yang bersih,transparan,efisien,dan efeltif demi mencapai suatu tata kelola pemerintahan yang baik.ini adlah harapan bagi setiap warga untuk menerima pelayanan yang memuaskan dari pihak pemerintah.saat ini,pemerintah harus menyesuaikan diri dengan kemajuab teknologi agar tidak ketinggalan dan dapat memenuhi tuntutan masyarakat yang kian beragam.

Perkembangan teknologi saat ini mendukung BAPPEDA (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) untuk berinovasi dengan menciptakan sistem informasi terpadu dalam perencanaan dan pembangunan daerah yang sejalan dengan tujuan pembangunan nasional. Salah satu inovasi dari sistem ini adalah aplikasi E-Planning, yang mempermudah proses perencanaan pembangunan di semua level secara administratif. E-Planning kini menjadi salah satu bentuk penerapan e-government, namun lebih fokus pada penggunaan teknologi elektronik

dalam bidang perencanaan dan pembangunan. Ini adalah langkah logis dalam mengembangkan sistem informasi untuk perencanaan pembangunan daerah.

Sistem e-Planning adalah suatu platform informasi yang menggabungkan berbagai proses perencanaan pembangunan daerah ke dalam bentuk digital yang saling terhubung. Penerapan sistem ini selaras dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengenai Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 yang mengatur tentang Tahapan, Prosedur Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.Sistem e-Planning adalah suatu platform informasi yang menggabungkan berbagai proses perencanaan pembangunan daerah ke dalam bentuk digital yang saling terhubung. Penerapan sistem ini selaras dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah 8 Tahun 2008 yang mengatur tentang Langkah-Langkah, Proses Penyusunan, Pengawasan, serta Penilaian Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Salah satu daerah yang telah mengadopsi e-Planning dalam kegiatan perencanaannya adalah Kabupaten Gorontalo. Sebagai sebuah daerah otonom di Provinsi Gorontalo, kabupaten ini telah menerapkan sistem e-Planning dalam upaya perencanaan pembangunan. Langkah ini merupakan bagian dari usaha pemerintah daerah untuk memperbarui sistem perencanaan pembangunan dan meningkatkan mutu perencanaan pembangunan di wilayah tersebut.

Undang-Undang (UU) serta peraturan yang berkaitan dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) mencakup UU No. 25 Tahun 2004 yang mengatur tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, meliputi perencanaan, pengelolaan, dan monitoring pembangunan, serta UU No. 1 Tahun 2022 yang mengatur tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, yang berisi tentang manajemen keuangan ditingkat daerah dan alokasi dana antara pemerintah pusat dan daerah. Berdasarkan Permendagri No. 70 Tahun 2019 yang mengatur Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), peraturan ini mengelola data dan informasi terkait pemerintahan daerah, sedangkan Permendagri No. 98 Tahun 2018 yang mengatur Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD), berfokus pada pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah. Namun, peraturan tersebut telah dicabut oleh Permendagri No. 70 Tahun 2019.

Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Gorontalo, sebagai sektor terdepan dalam perencanaan pembangunan daerah, memainkan peran penting dalam mengimplementasikan sistem e-Planning. Keberhasilan penerapan sistem ini sangat tergantung pada kemampuan BAPPEDA dalam mengelola dan mengoptimalkan penggunaannya. Dengan adanya aplikasi e-Planning dalam proses perencanaan, diharapkan dapat mempermudah tugas

para perencana, mengingat bahwa proses perencanaan memerlukan waktu yang lama dan ketelitian tinggi dalam penyusunannya. Hal ini bertujuan untuk menghasilkan dokumen perencanaan yang sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan observasi awal, implementasi sistem e-Planning di Kabupaten Gorontalo sudah berjalan beberapa tahun ini namun masih banyak permasalahan. Salah satunya adalah kesiapan sumber daya manusia dalam mengoperasikan sistem. Tidak semua aparatur memiliki pemahaman dan keterampilan dalam Penggunaan teknologi informasi, terutama dalam aspek e-planning, akan memengaruhi cara penyusunan dokumen perencanaan untuk pembangunan daerah. Secara otomatis, hal ini akan menghadirkan tantangan serius dalam sektor perencanaan pembangunan. Di sisi lain, masalah muncul karena para aparatur mengalami kesulitan dalam menyusun dokumen rencana akibat keterbatasan pengetahuan mengenai standar operasional prosedur perencanaan yang berlaku, serta adanya gangguan pada koneksi internet yang tidak stabil. Hal ini berdampak pada pelaksanaan program e-planning, sehingga para aparatur kesulitan untuk menganalisis capaian kinerja, baik antar waktu, antar wilayah, maupun dalam hal kecocokan dengan sasaran program dan kegiatan yang diharapkan sesuai dengan visi dan misi organisasi. Situasi ini berpotensi memengaruhi kualitas data dan informasi yang dihasilkan.

Aspek regulasi dan kebijakan juga memainkan peran penting dalam implementasi e-Planning. Keberlanjutan sistem e-Planning juga perlu mendapat perhatian khusus. Sistem ini perlu terus dikembangkan dan disempurnakan sesuai dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan organisasi. Sistem pemeliharaan dan pengembangan kapasitas SDM perlu dilakukan secara berkelanjutan.

Analisis mendalam terhadap penerapan e-Planning di Kabupaten Gorontalo menjadi penting untuk dilakukan mengingat perencanaan pembangunan daerah merupakan aspek fundamental dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance). Dalam perspektif Islam, konsep perencanaan telah dijelaskan dalam Al-Qur'an, salah satunya dalam Surah Al-Hasyr ayat 18 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan."

Ayat tersebut mengandung prinsip dasar tentang pentingnya perencanaan masa depan yang sistematis dan terukur. Dalam konteks pembangunan daerah, perencanaan yang baik

menjadi kunci keberhasilan dalam mencapai tujuan pembangunan. Sistem e-Planning hadir sebagai perwujudan modern dari prinsip perencanaan yang diajarkan dalam Al-Qur'an, di mana setiap langkah pembangunan harus direncanakan dengan matang dan dapat dipertanggungjawabkan.

Penelitian ini juga berkaitan dengan permintaan untuk meningkatkan mutu layanan publik serta pengelolaan pemerintahan yang baik. Penerapan e-Planning merupakan salah satu inovasi yang dapat membantu mencapai sasaran tersebut dengan meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam proses perencanaan pembangunan.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, penelitian ini berfokus pada studi berjudul "Penerapan Sistem E-Planning di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gorontalo. "

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang ada, identifikasi masalah yang akan diteliti yaitu:

1. Adanya gangguan fasilitas jaringan internet yang tidak stabil berdampak pada pengoprasian program e-planning
2. Belum kuatnyaStandard Operating Procedure(sop) untuk dijadikan acuan
3. Kurangnya pemahaman dan keterampilan aparatur dalam penggunaan teknologi informasi terutama berhubungan dengan penerapan e-planning.

1.3. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Penerapan Sistem E-Planning Di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gorontalo ?
2. Apa saja faktor penghambat dan pendukung Penerapan Sistem E-Planning Di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gorontalo

1.4. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis sejauh mana penerapan sistem e-Planning mendukung proses perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Gorontalo.

1.5. Manfaat Penelitian

1. Teoritis

Memberikan kontribusi terhadap kajian implementasi teknologi dalam tata kelola pemerintahan.

2 Praktis

Memberikan rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan efektivitas sistem e-Planning di Kabupaten Gorontalo.